RINGKASAN EKSEKUTIF

DIKPLHD

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Dokumen IKPLHD disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bab VIII tentang sistem informasi pasal 62 ayat (1-3) yang menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah menjadi perangkat penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi kondisi lingkungan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan pembangunan. Mengacu pada hal diatas, maka Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui DLH Kota Pekalongan, dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik.

II. ANALISA DPSIR

A. Tata Guna Lahan

Driving Force; Permasalahan tata guna lahan dipicu oleh **pertumbuhan penduduk** Kota Pekalongan dalam 5 tahun terakhir (tahun 2017 – 2021) bertambah sebanyak 6440 jiwa. Faktor lainnya adalah **pertumbuhan ekonomi**, laju perekonomian di tahun 2021 sebesar 3.59 persen. Kontribusi terhadap PDRB paling besar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan

Pressure; Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan memicu **peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal (perumahan), industri, perdagangan jasa dan infrastruktur** sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap disisi lain kebutuhan lahan semakin meningkat, sehingga akan menimbulkan permasalahan tata guna lahan.

State; **Kondisi penggunaan lahan** sawah semakin berkurang, luas sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2017 seluas 980 Ha dan tahun 2021 seluas 832 Ha. Kurun waktu 5 tahun (tahun 2017 – 2021) terjadi

perubahan lahan sawah menjadi lahan terbangun sebesar 148 ha (terjadi penurunan sebesar 3,3%).

Impact; Permasalahan tata guna lahan akan mengakibatkan terjadinya **peningkatan resiko bencana banjir dan terjadinya peningkatan suhu.**

Response; Pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi/kebijakan penataan ruang yaitu Revisi RTRW Kota Pekalongan tahun 2009 – 2029 (Penetapan LP2B), **Peningkatan pengawasan dan penertiban ijin lingkungan bagi pelaku usaha/industri. Peningkatan Kualitas Hasil Pertanian** (pengadaan sarana pembibitan, pengembangan demplot, penanganan pasca panen, pemberian bantuan benih dan pupuk bersubsidi serta pengelolaan sistem irigasi)

B. Kualitas Air

Driving Force; Permasalahan kualitas air dipicu oleh **pertumbuhan penduduk** dan **perilaku PHBS masyarakat yang masih kurang**. Pada tahun 2021, terdapat 213 KK yang melakukan BABS di sungai atau sekitar

0,21% dari jumlah KK di Kota Pekalongan ada di Kelurahan Setono, Degayu dan Padukuhan Keraton. Selain itu, **kurangnya ketaatan pelaku usaha/industri** dalam pengelolaan lingkungan terutama untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. **Pertumbuhan Industri**, tahun 2021, pertumbuhan industri Kota Pekalongan sebesar 17,18% dengan total IKM sebanyak 8280 unit usaha.

Pressure; Peningkatan permukiman dan industri memicu pencemaran limbah domestik maupun industri. Selain itu, **belum optimalnya IPAL** atau daya tampung IPAL Komunal belum mampu menampung semua limbah yang dihasilkan oleh semua industri. Faktor lain yang menjadi tekanan adalah adanya **eksploitasi air tanah** yang tidak terkendali untuk keperluan rumah tangga dan industri.

State; Kondisi kualitas air sungai, Sungai Asem Binatur melebihi baku mutu parameter TSS, BOD, COD dan Total Coliform. Sungai Banger melebihi baku mutu parameter TDS, DO, BOD, COD, Total Coliform. Sungai Bremi melebihi baku mutu parameter BOD, COD dan Total Coliform. Sungai Meduri melebihi baku mutu parameter TDS, BOD, dan COD. Sungai Pekalongan melebihi baku mutu parameter TDS, DO, BOD, COD dan Total Coliform.

Kondisi air limbah, Sumber pencemaran terbesar adalah industri batik dengan volume limbah sebesar 4281 m³/hari berasal dari 4362 industri.

Impact; Penurunan kualitas air menyebabkan **gangguan kesehatan** (sebanyak 4726 orang menderita penyakit diare) dan **terganggunya keseimbangan perairan sungai terganggu (kematian ikan dan biota perairan)**. Dampak yang lain adalah dapat mengurangi keindahan kota dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Response; Pembangunan IPAL, Pemkot Pekalongan telah membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tahu maupun industri peternakan, secara rutin melakukan **Pemantauan kualitas air sungai dan air limbah, Sosialisasi pengelolaan air limbah bagi pelaku usaha industri**, untuk membangun kesadaran bagi

pelaku usaha industri untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke sungai, **Pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan/ industri/ pelaku usaha penghasil air limbah, Penerapan kebijakan pengendalian air bawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku** yaitu melalui moratorium (pembatasan) pengambilan air bawah tanah yang baru.

C. Kualitas Udara

Driving Force; Permasalahan kualitas udara dipicu oleh **pertumbuhan penduduk**, mobilitas penduduk menggunakan moda transportasi akan memicu terjadinya peningkatan kendaraan bermotor, **Pertumbuhan industri** menyebabkan emisi polutan udara semakin besar yang dapat memperburuk kualitas udara

Pressure; Penggunaan bahan bakar energi baik untuk kendaraan bermotor maupun kegiatan industri akan meningkatkan paparan gas buang yang dikeluarkan ke udara.

State; Kondisi kualitas udara ambien, Hasil pengujian kualitas

udara ambien dengan parameter SO₂ dan NO₂ masih dibawah baku mutu yang ditetapkan, Nilai IKU Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 80,21 (kategori Baik)

Impact; Penurunan kualitas udara ambien menimbulkan **gangguan kesehatan** (penyakit ISPA dan paru-paru) dan **lingkungan** (menimbulkan hujan asam, rusaknya konstruksi dan timbulnya penyakit pada tanaman).

Response; Pemantauan udara secara periodik pada beberapa tempat potensi terjadi pencemaran udara, **Peningkatan Ketersediaan RTH**, terdapat 6 Tahura dengan total luas 5,76 ha dan RTH di Kota Pekalongan total luas 8,77 ha. **Kegiatan Penghijauan**, Pada tahun 2021, DLH Kota Pekalongan telah mendistribusikan sebanyak 1578 pohon pada 49 lokasi tersebar di semua kecamatan, **Melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan**, mewajibkan seluruh usaha yang menimbulkan emisi untuk melakukan pengelolaan dan melaporkan hasil uji kualitas udara emisi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, **Penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim**, melalui kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM).

D. Resiko Bencana

Driving Force; Kondisi geografis Kota Pekalongan menjadi faktor pemicu terjadinya bencana, **penurunan muka tanah**, Berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kota Pekalongan mengalami penurunan muka tanah sekitar 2,1 cm - 11 cm per tahun, hal ini menyebabkan potensi terjadinya banjir rob, yang sampai sekarang wilayah bencana banjir rob terus bertambah

Pressure; Faktor tekanan yang menyebabkan terjadinya bencana adalah **perilaku masyarakat** dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak terkendali sehingga melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan dikeluarkan ke udara.

State; skor IRB Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 138,13 (kategori sedang), 4 bencana yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi yaitu bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi serta bencana kekeringan. Berdasarkan data dari BPBD Kota Pekalongan, **jumlah kejadian bencana** banjir/rob tahun 2021 sebanyak 22 kejadian dengan **Luas genangan rob** pada bulan November – Desember 2021 seluas 526,95 ha.

Impact; Dampak dari terjadinya bencana banjir dan rob yang melanda antara lain kerugian materi/harta benda, kerugian infrastruktur, korban jiwa (mengungsi), kerusakan lahan maupun dampak psikis karena adanya trauma pasca bencana

Response; Penanggulangan banjir melalui **Pembangunan Stasiun pompa banjir, rehabilitasi bangunan perkuatan tebing, Rehabilitasi saluran drainase. Penanggulangan Abrasi**, penguatan revetmen pantai sepanjang bibir pantai, **Penanggulangan Rob**, Pembangunan tanggul rob oleh BBWS Pemali Juana, **Pengelolaan kawasan rawan bencana melalui kebijakan penataan ruang**, melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, **Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan**, tahun 2021, BPBD melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan sebanyak 24 kegiatan.

Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, dengan membentuk tim pengawasan pengendalian air bawah tanah terdiri dari DLH, Cabang dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, BPKAD, Satpol PP, dan Bagian Hukum Setda yang tiap tahun melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah terhadap usaha – usaha yang menggunakan air bawah tanah.

E. Perkotaan

Driving Force; Meningkatnya **pertumbuhan penduduk** akan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, selain itu **perilaku dan kesadaran masyarakat** terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan yang masih rendah. Peningkatan **pertumbuhan ekonomi**, aktivitas ekonomi seperti industri, perhotelan, rumah sakit, dan kegiatan lainnya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Pressure; Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi secara langsung berbanding lurus dengan **peningkatan kebutuhan sarana prasarana permukiman, kebutuhan air bersih dan sanitasi**, juga memicu **peningkatan jumlah timbulan sampah dan limbah**.

State; Kualitas SDM, tahun 2021 sebagian besar penduduk Kota Pekalongan memiliki jenjang pendidikan tingkat dasar (SD – SLTP) yaitu sebanyak 170.578 jiwa (53,94%); Berdasarkan data BPS, **jumlah penduduk miskin** Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 23.490 jiwa, **Kondisi Sumber air minum**; Penduduk Kota Pekalongan sebagian besar masih menggunakan sumur untuk sumber air minum sebesar 65%, ledeng/PAM sebesar 35 %.; **Kondisi Sanitasi**, 92,04% rumah tangga di Kota Pekalongan telah memiliki fasilitas tempat BAB (jamban) sendiri, menggunakan jamban bersama sebesar 7,64%. tempat BAB di sungai sekitar 0,31%; **Kondisi Persampahan, Jumlah timbulan sampah** Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebanyak 246,65 m³/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 308.310 jiwa. **Komposisi sampah**, pada tahun 2021 didominasi oleh sampah organik sebanyak 66%; **Kondisi TPA**, terletak di Kelurahan Degayu seluas 5,8 Ha yang beroperasi pada tahun 1994. Luas lahan efektif yang digunakan sekitar 5 ha, pengoperasian menggunakan sistem open dumping. Kondisi tumpukan sampah setinggi 20 meter, sampah masuk yaitu sekitar 129,5 Ton/hari atau 49,81 m³. Volume TPA Degayu adalah sebesar 1.160.000 m². Pada tahun 2021, persentase sampah tertangani sebesar 87,98%; **Kondisi Limbah**, tahun 2021 tercatat sejumlah 4281 m³/hari limbah yang dihasilkan oleh sebanyak 4362 industri batik

Impact; penurunan tingkat kesehatan dan kenyamanan masyarakat

Response; Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat melalui Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, Peningkatan kesejahteraan masyarakat (program penanggulangan kemiskinan misalnya pembangunan jamban keluarga), **Sosialisasi PHBS**; Peningkatan edukasi/sosialisasi masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R dan pemanfaatan sampah plastik; **Pembentukan bank sampah dan Pembangunan TPS3R**, Jumlah bank sampah di Kota Pekalongan adalah 4 unit, Jumlah TPS3R adalah sebanyak 20 unit; **Menggiatkan kegiatan yang dapat**

memacu dalam upaya pengelolaan sampah (acara pameran/bazar produk daur ulang; Penegakan hukum, pemberian sanksi dan reward terhadap upaya pengelolaan sampah; Pemenuhan kelengkapan sarpras pengendali pencemaran (1 unit Dump truck, 25 unit Container mini, 2 unit alat pencacah sampah, 2 unit kendaraan roda 3); **Peningkatan upaya pengawasan dan monitoring terhadap pelaku industri terkait timbulan limbah B3 yang dihasilkan; Penegakan aturan terkait ijin pengelolaan limbah B3**

F. Tata Kelola

Driving Force; Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup, Alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar Rp. 30.578.076.000, Alokasi terbesar adalah anggaran untuk program pengelolaan persampahan yaitu sebesar 30,5% dari total anggaran

Pressure; pengaduan masyarakat. Keluhan atau aduan ini dapat dilihat sebagai tekanan (*pressure*) yang efektif sejauh dikelola dengan baik, Selama tahun 2021 tercatat ada 44 aduan yang disampaikan masyarakat,

sebagian besar sudah ditindak lanjuti, 6 aduan belum ditindaklanjuti.

State; SDM, upaya pengelolaan lingkungan akan maksimal apabila dilaksanakan secara bersama oleh semua pihak, yaitu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang salah satunya melibatkan LSM, terdapat 4 LSM yang ada di Kota Pekalongan dan sudah berbadan hukum. **Perijinan, ijin lingkungan**, 2 DPLH dan 91 SPPL, **3 ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam : Ijin Pengelolaan Limbah B3** : 1 ijin perusahaan industri, 1 ijin Rumah sakit dan 1 ijin laboratorium; **Kelembagaan**, DLH Kota Pekalongan didukung oleh 101 personel, Persentase terbanyak adalah pendidikan SLTA (33,66%), terdapat 9 orang staf fungsional dan 1 orang yang sudah pernah mengikuti diklat

Impact; Penerimaan penghargaan lingkungan hidup. Tahun 2021, Kota Pekalongan mendapatkan 1 penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional (SMAN 4 Pekalongan) dan 2 penghargaan sekolah adiwiyata tingkat propinsi (SMPN 02 dan 08 Pekalongan).

Response; Pengelolaan lingkungan melalui penetapan produk hukum, tercatat ada 15 produk hukum berupa 8 Perda dan 7 Perwal; **Peningkatan kompetensi personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup melalui bintek dan diklat; Tindak lanjut pengaduan masyarakat.**

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Inventarisasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan DIKPLHD, dari unsur pemerintah dan non pemerintah, lembaga masyarakat dan unsur akademisi
 - Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh seluruh stake holder. Tahapan proses FGD adalah Penjaringan isu strategis lingkungan hidup dengan menggunakan metaplan dan diperoleh sejumlah 15 isu lingkungan hidup kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sama.
2. Hasil pengelompokan isu, dilakukan voting utk menentukan urutan isu prioritas sehingga dihasilkan sebagai berikut (1) Penurunan Kualitas dan

Kuantitas Air; (2) Pengelolaan Sampah; (3) Penurunan Muka Tanah; (4) Berkurangnya RTH

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alokasi Anggaran pengelolaan lingkungan hidup DLH Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebesar Rp. 30.578.076.000, meningkat sebesar 19,31% dibandingkan tahun 2020. Jumlah alokasi yang paling besar adalah program pengelolaan persampahan yaitu Rp. 9.328.368.000.

2. Peningkatan Kapasitas Personil Lembaga

Melalui program bintek dan diklat untuk menunjang tugas sebagai pelaksana di bidang pengelolaan lingkungan hidup

3. Pengembangan Jejaring Kerjasama

Diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai elemen meliputi Pemerintah Kota / Kabupaten dalam dan luar negeri, instansi / perusahaan / institusi pendidikan di Kota Pekalongan

4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Menerapkan sistem elektronik pemerintah atau yang disebut e-government.web dengan portal <http://pekalongankota.go.id>.

B. Upaya Pelestarian Lingkungan

1. Kegiatan Penghijauan

Pemkot Pekalongan mencanangkan program **GERAKAN GEMAR MENANAM POHON**, bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, penghijauan, serta pencegahan terjadinya longsor dan banjir. Dilakukan secara bertahap di setiap kelurahan melalui penyediaan bibit tanaman sayur maupun tanaman keras (jeruk, mangga, dan kelengkeng)

2. Kegiatan Bersih Sungai

Kegiatan pembersihan Sungai Loji dari sampah dilakukan oleh Tim Jogo Kali DLH Kota Pekalongan. Pembersihan sungai dari enceng gondok yang menghambat saluran air dan berpotensi menyebabkan

banjir/luapan air dari sepanjang ungai mulai dari Sungai Meduri hingga Randujajar

3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kota Pekalongan memiliki 6 (enam) Hutan Kota (TAHURA) sebagai RTH Publik dan 10 (sepuluh) Taman kota.

4. Kegiatan Lomba Bersih Sehat (LBS)

Prestasi didapatkan oleh Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat masuk 6 besar Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Nasional. Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan kegiatan Lomba Kelurahan terbersih dan terkotor untuk kebersihan lingkungan permukiman.

5. Kegiatan Lomba Sekolah Adiwiyata

6. Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat / Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kebun bibit, demplot kelompok, dan pekarangan anggota yang dilakukan di lahan tidur maupun pekarangan sekitar tempat tinggal dengan menggunakan polibag maupun barang yang tidak terpakai.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah industri, serta prasarana pendukung jasa seperti pasar, hotel, rumah sakit, sekolah, perkantoran, dan permukiman akan meningkatkan tekanan (*pressure*) terhadap lingkungan hidup di Kota Pekalongan sehingga memicu alih fungsi lahan, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, timbulnya bencana dan masalah perkotaan tentang peningkatan timbulan sampah, sanitasi dan limbah
- b. Kondisi (*state*) penggunaan lahan sawah di Kota Pekalongan dari tahun 2017 - 2021 mengalami penurunan. Luas sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2017 adalah 980 Ha dan tahun 2021 adalah 832 Ha.

- c. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air, kondisi (*state*) sebagian air sungai tercemar ringan dan sedang, jika dibandingkan terhadap baku mutu kualitas air kelas II berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2021 sebesar 45.
- d. Berdasarkan analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan parameter NO₂ dan SO₂ dengan metode *passive sampler*, kondisi (*state*) kualitas udara Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebesar 80,31.
- e. Kota Pekalongan memiliki resiko bencana banjir dan rob. Genangan air rob menggenangi lahan permukiman, pertambakan, sawah, dan rawa. Lahan yang tergenang oleh rob semakin meningkat. Luas genangan rob di Kota Pekalongan pada bulan november – desember tahun 2021 seluas 526,95 ha.
- f. Jumlah timbulan sampah Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebanyak 246,65 m³/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 308.310 jiwa. Penduduk Kota Pekalongan sebagian besar telah memiliki akses sanitasi yang layak. Sebanyak 92,04% rumah tangga telah memiliki fasilitas jamban sendiri.

2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut berdasarkan isu prioritas sebagai berikut :

- 1) Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
 - a. Pembangunan IPAL komunal
 - b. Pembinaan dan sosialisasi pengelolaan limbah bagi pelaku usaha industri.
 - c. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha industri yang menghasilkan limbah.
 - d. Membuat sumur resapan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air tanah
 - e. Pengelolaan Sampah
- 2) Peningkatan edukasi/sosialisasi masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pemanfaatan sampah plastik.

- a. Pembentukan bank sampah dan Pembangunan TPS3R
 - b. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarpras serta tenaga pengelola yang telah terlatih
 - c. Pemenuhan kelengkapan sarpras pengangkutan sampah dengan menggunakan alat yang berteknologi modern
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TPS maupun Transfer Depo supaya lebih bersih
- 3) Penurunan Muka tanah
- a. Pengawasan dan pemantauan terhadap pengambilan air bawah tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkot Pekalongan sudah melakukan moratorium terhadap rekomendasi pengambilan air bawah tanah yang baru, sedangkan yang sudah ada tetap berjalan dengan pengendalian pemakaian air yang sesuai dengan debit yang diizinkan dan diarahkan ke penggunaan air PDAM.
 - b. Pembangunan SPAM Regional Petanglong, yaitu SPAM yang mencakup beberapa daerah Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang
- 4) Berkurangnya RTH
- a. Penyediaan RTH / pembangunan RTH publik
 - b. Upaya sosialisasi gerakan penghijauan di lingkungan rumah warga masyarakat untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman

Secara umum beberapa hal yang harus dilakukan antara lain :

1. Peningkatan program pengelolaan lingkungan yang langsung dan banyak memberdayakan masyarakat serta peningkatan peran serta dan partisipasi pihak swasta / industri sebagai sebagai pelaku usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
2. Penguatan kelembagaan lingkungan hidup melalui tata aturan, organisasi dan pembiayaan